

Kepsek SDN 2 Baadia-Baubau Nursida Kembangkan Gerakan TANGGUH, Adaptasi 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat



Kepala SDN 2 Baadia, Kota Baubau, Nursida, S.Pd., M.Pd

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP- Kepala SDN 2 Baadia, Kota Baubau, Nursida, S.Pd., M.Pd., mengembangkan Gerakan TANGGUH sebagai inovasi kepemimpinan pembelajaran untuk mengubah tujuh kebiasaan Anak Indonesia Hebat menjadi budaya yang lebih mudah diterapkan dan diukur di lingkungan sekolah.

Gerakan terse-

but dirancang selama Nursida menjalankan tugas sebagai kepala sekolah selama 3,9 tahun di SDN 2 Baadia. TANGGUH merupakan akronim dari Tertib Bangun Pagi, Awali Waktu untuk Ibadah, Giat Sehat Berolahraga, Gizi Seimbang dan Makan Sehat, Gemar Membaca dan Belajar, Ulet Bermasyarakat dan Berempati, serta Rehat dan Tidur Lebih

Lanjut ke Hal: 7

Buton Selatan, Baubau, dan Buton Bangun Sinergi Pangan untuk Jaga Daya Beli Warga dan Kendalikan Inflasi

GERAKAN PENGENDALIAN INFLASI DAN PANGHAN SEJAHTERA

TIGA DAERAH SATU KOMITMEN

Pemerintah Kota Baubau, Kabupaten Buton, dan Kabupaten Buton Selatan menandatangani kesepakatan kerja sama untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi.

PERLANCAR PASOKAN & DISTRIBUSI

Memperkuat mekanisme distribusi lintas wilayah, memperluas pasokan, dan menjaga keterjangkauan harga, terutama komoditas hortikultura.

LANGKAH NYATA YANG DISEPAKATI

- ✓ Pemantauan harga bersama
- ✓ Tukar data stok dan harga
- ✓ Perluas distribusi komoditas potensial inflasi
- ✓ Perkuat komunikasi ke masyarakat

FOKUS PADA KOMODITAS HORTIKULTURA

Berdasarkan pemetaan kelebihan dan kekurangan pasokan di Baubau, Buton, dan Buton Selatan, dengan melibatkan BUMD, koperasi, dan pelaku usaha melalui PKS teknis.

BERLAKU 2 TAHUN DAN DIEVALUASI

Kesepakatan berlaku selama dua tahun sejak penandatanganan, dievaluasi setiap tahun. Pembiayaan bersumber dari APBD masing-masing daerah dan sumber lain yang sah.

UNTUK DAYA BELI WARGA DAN STABILITAS EKONOMI

Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan meredam tekanan harga pangan, sejalan dengan pengalaman krisis dan lonjakan harga global.

“Kerja sama ini bukan sekadar kesepakatan tertulis, tetapi langkah nyata untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.”

— Yusran Fahim
Wali Kota Baubau

Laporan: ARDI, Baubau Post-Durasi Times

BUTON SELATAN, BP - Pemerintah Kota Baubau, Kabupaten Buton, dan Kabupaten Buton Selatan menandatangani kesepakatan untuk menjaga stabilitas harga pangan melalui kerja sama antardaerah. Kesepakatan yang ditandatangani Senin (5/10/2026) itu diarahkan untuk memperluas pasokan, memperluas distribusi, dan menjaga keterjangkauan harga komoditas pangan, terutama hortikultura.

Kerja sama tersebut ditandatangani Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, dan Bupati Buton Selatan Muhammad Adios. Ketiga pemerintah daerah melihat perlunya mekanisme distribusi lintas wilayah karena terdapat daerah yang mengalami kelebihan pasokan komoditas tertentu, sementara wilayah lain menghadapi kekurangan.

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Buton Tengah Dr Azhari Perkuat Sinergi Lintas Sektor Tangani RTLH dan Kawasan Kumuh



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dan kawasan kumuh dengan membenahi basis data permukiman serta memperkuat ke-

Lanjut ke Hal: 7

HUT ke-81 TNI, Dandim 1413/Buton Tekankan Lima Pilar Budaya Kerja PRIMA

Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Profesionalisme dan kesiapan prajurit menjadi pesan utama dalam peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah Komando Distrik Militer (Kodim) 1413/Buton, Senin (5/10/2026). Pesan tersebut disampaikan Dandim 1413/Buton Letkol Inf Yoni, S.Hub., Int. saat membacakan amanat tertulis Panglima TNI dalam upacara yang mengusung tema “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat,



Adil, dan Makmur.” Panglima TNI dalam amanatnya menekankan lima pilar budaya kerja PRIMA, yakni Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif.

Kelima prinsip tersebut dinilai penting untuk menjadi pedoman prajurit dalam menghadapi ketidakpastian global, perkembangan ruang informasi dan kognitif, serta ber-

bagai bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara.

“Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya,

Lanjut ke Hal: 7

Kantor Pertanahan Buton Selatan Ikuti Rapat Validasi Blanko Sertipikat Analog, ATR/BPN Sultra Perkuat Tertib Administrasi



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP- Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan mengikuti Rapat Validasi Data Opname Fisik Persediaan Blanko Sertipikat Analog yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Zoom Meeting. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan tertib administrasi persediaan blanko sertipikat pada jajaran Kantor Pertanahan di Sulawesi

Tenggara.

Rapat diikuti Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan beserta staf. Forum tersebut juga melibatkan seluruh Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara sehingga proses validasi dapat dilakukan secara terkoordinasi antarsatuan kerja.

Validasi dilakukan terhadap data opname fisik persediaan blanko sertipikat analog. Pencocokan antara data administrasi dan kondisi persediaan secara fisik diperlukan untuk memastikan

setiap blanko tercatat secara akurat serta mendukung pengendalian administrasi pertanahan. “Validasi data persediaan menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban administrasi,” demikian substansi yang ditekankan dalam kegiatan tersebut.

Rapat dipimpin langsung Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepemimpinan forum tersebut sekaligus menjadi sarana koordinasi bagi jajaran tata usaha Kan-

Lanjut ke Hal: 7

APBD-P 2026 Disepakati, Pemkab Buton Fokus Optimalkan Pembangunan Daerah



Laporan: La Harman

BUTON, BP- Pemerintah Kabupaten Buton mendapat ruang fiskal untuk menyesuaikan pelaksanaan program pembangunan setelah DPRD Kabupaten Buton menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Kabupaten Buton, Pasarwajo, Rabu malam, 30 September 2026.

Persetujuan tersebut menjadi tahapan penting dalam pengelolaan keuangan daerah karena memungkinkan pemerintah menyesuaikan program dan kegiatan dengan perkembangan kebutuhan serta prioritas pembangunan sepanjang tahun anggaran berjalan. Setelah kesepakatan dicapai, pelaksanaan anggaran diarahkan tetap memperhatikan efektivitas, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.

Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., mengatakan keberhasilan APBD tidak hanya ditentukan oleh proses penetapan anggaran, tetapi juga oleh ke-

mampuan seluruh pemangku kepentingan mengawal pelaksanaannya. Karena itu, pemerintah daerah menilai koordinasi dengan DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dunia usaha, dan masyarakat perlu terus diperkuat.

“Dengan ditetapkannya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini, saya berharap sinergi antara Pemerintah Daerah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat,” ujar Alvin dalam pidatonya.

Menurut Alvin, kolaborasi diperlukan agar kebijakan fiskal yang telah disepakati tidak berhenti sebagai dokumen administrasi pemerintahan. Anggaran harus diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Buton.

Dari sisi tata kelola, pembahasan APBD Perubahan juga menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dan penyesuaian kebijakan pemerintah daerah bersama lembaga legislatif. Proses tersebut sekaligus

menjadi instrumen untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan sesuai kebutuhan daerah.

Bupati berharap seluruh tahapan pembahasan yang telah dilalui dapat memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus mendorong pembangunan yang lebih efektif. Pemerintah Kabupaten Buton selanjutnya dituntut mengoptimalkan anggaran yang telah disepakati dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kepentingan publik.

“Semoga seluruh proses yang telah kita lalui menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkualitas, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton,” kata Alvin.

Secara historis, perubahan APBD merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang berkembang seiring penguatan desentralisasi di Indonesia. Setelah era reformasi, pengelolaan keuangan daerah semakin menempatkan APBD sebagai instrumen utama untuk menerjemah-

kan prioritas pemerintahan daerah ke dalam program pelayanan publik dan pembangunan.

Dalam perkembangan tata kelola pemerintahan modern, anggaran publik juga tidak lagi semata-mata dipandang sebagai daftar penerimaan dan belanja. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, efektivitas anggaran semakin dikaitkan dengan transparansi, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, serta dampaknya terhadap masyarakat. Karena itu, perubahan anggaran perlu diikuti pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Dengan disetujuinya APBD-P 2026, Pemerintah Kabupaten Buton kini memiliki tanggung jawab untuk memastikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat berjalan secara optimal hingga akhir tahun anggaran. Pemerintah dan DPRD diharapkan mempertahankan sinergi agar penyesuaian anggaran tersebut benar-benar mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)

Gibran Tanggapi Putusan MK soal Ijazah, Tegaskan Pernah Kuliah hingga S1



Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak ada bukti ijazah kelulusan pendidikan setara SMA, menurut penelusuran MK.

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memilih melanjutkan aktivitas pemerintahan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pihak-pihak yang meminta dirinya didiskualifikasi sebagai Wakil Presiden. Gibran juga menanggapi sorotan MK mengenai tidak ditemukannya dokumen yang menunjukkan ijazah pendidikan menengahnya di luar negeri yang setara dengan SMA.

Gibran menyampaikan sikap tersebut kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/10), sehari setelah MK membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XX-IV/2026 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Ia mengatakan proses yang berlangsung di lembaga peradilan konstitusi harus dihormati.

“Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan menyelesaikan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami,” kata Gibran.

Ketika ditanya mengenai pertimbangan MK yang menyebabkan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan dirinya memiliki ijazah sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat, Gibran menjawab dengan merujuk pada jenjang pendidikan yang telah ditempuhnya.

“Kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuli-

ah sampai S1 juga di Singapura,” ujarnya.

Dalam putusan tersebut, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Atas dasar itu, MK tidak berwenang mengabulkan permintaan untuk mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Perkara itu diajukan sejumlah pihak, yakni Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.

Meski permohonan untuk mendiskualifikasi Gibran tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon, MK tetap menguraikan sejumlah fakta persidangan terkait dokumen pendidikan Gibran. Berdasarkan fakta tersebut, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam pertimbangannya menyebut Gibran pernah mengajukan permohonan penyetaraan ijazah SMA melalui aplikasi e-layanan penyetaraan ijazah luar negeri. Keterangan mengenai proses tersebut disampaikan perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam persidangan.

Salah satu dokumen yang menjadi dasar pengajuan surat keterangan penyetaraan ijazah, sebagaimana

diungkapkan dalam persidangan, adalah hasil pindai ijazah, diploma, sertifikat, atau dokumen hasil belajar sesuai jenjang yang hendak disetarakan. Dokumen tersebut juga dapat berupa surat keterangan yang menunjukkan seseorang telah tamat belajar.

Persoalan syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden memiliki pijakan penting dalam sejarah pemilu Indonesia. Dalam setiap pemilu langsung sejak 2004, persyaratan administratif pasangan calon menjadi bagian yang diperiksa oleh penyelenggara pemilu untuk memastikan calon memenuhi ketentuan perundang-undangan sebelum mengikuti kontestasi.

Di tingkat internasional, pemeriksaan persyaratan pendidikan dan kelayakan kandidat juga dikenal dalam berbagai sistem pemilu, meski ketentuannya berbeda antarnegara. Sejumlah negara justru tidak mensyaratkan pendidikan formal tertentu bagi calon kepala pemerintahan, sementara negara lain menetapkan persyaratan administratif yang lebih spesifik. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kualifikasi kandidat merupakan bagian dari desain konstitusional masing-masing negara.

Bagi Gibran, polemik tersebut kini memasuki babak setelah putusan MK dibacakan. Ia menyatakan akan tetap menjalankan tugas sebagai wakil presiden dan mendukung pelaksanaan program pemerintahan Presiden, sembari menghormati seluruh proses hukum yang telah berlangsung. (*)

Stunting Buton Selatan 18,2 Persen, Pemprov Sultra Perkuat Aksi Bergizi di Buton dan Busel



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperluas pencegahan stunting dengan menyasar kelompok remaja melalui Gerakan Cegah Stunting melalui Aksi Bergizi di Kabupaten Buton dan Buton Selatan. Program tersebut dilakukan melalui pemberian Tablet Tambah Darah (TTD), skrining anemia, pemeriksaan kesehatan, edukasi gizi, serta intervensi makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita yang membutuhkan.

Intervensi di dua daerah tersebut berlangsung pada 22-24 September 2026. Kegiatan pertama dilaksanakan di SMA Negeri 12 Buton, Desa Ambuau Indah, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, Selasa (22/9/2026), kemudian dilanjutkan di SMA Negeri 1 Lapandewa, Desa Lapandewa Jaya, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan, Kamis (24/9/2026).

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sultra Sijatiku, SKM., M.Kes., mengatakan data Sigizikesga/e-PPGBM dan data riil puskesmas hingga Juli 2026 menunjukkan prevalensi stunting Kabupaten Buton Selatan sebesar 18,2 persen. Di wilayah kerja Puskesmas Lapandewa, angkanya tercatat 28,7 persen.

“Data tersebut menjadi dasar da-

lam memperkuat intervensi kesehatan, termasuk melalui edukasi sejak remaja, pemberian TTD, pemeriksaan kesehatan, pemenuhan gizi, serta pembiasaan perilaku hidup sehat di lingkungan sekolah,” kata Sijatiku.

Di Lapandewa, sebanyak 113 siswi menerima TTD. Mereka juga memperoleh Cek Kesehatan Gratis (CKG) anak sekolah dan edukasi kesehatan. Pemerintah turut memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada dua ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan satu balita stunting.

Sementara itu, kegiatan di SMA Negeri 12 Buton menyasar 200 remaja putri dari SMA Negeri 12 Buton dan SMP Negeri 10 Lasalimu Selatan. Selain pemberian TTD, dilakukan skrining anemia bagi remaja putri SMA Negeri 12 Buton, CKG bagi anak usia sekolah dan masyarakat umum, serta penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Sekolah Sehat. PMT juga diberikan kepada dua ibu hamil dengan KEK dan tiga balita gizi.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra dr. Andi Edy Surahmat mengatakan pencegahan stunting tidak dapat dilakukan melalui intervensi sesaat. Pemerintah membutuhkan keterlibatan sekolah, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat agar pencegahan berlangsung sejak

sebelum kehamilan hingga periode pertumbuhan anak.

“Pencegahan stunting membutuhkan intervensi berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, sekolah, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat,” ujar Andi Edy.

Pendekatan melalui remaja berkaitan dengan siklus kehidupan. Pemenuhan gizi dan pencegahan anemia pada remaja putri dipandang penting karena kelompok tersebut merupakan calon ibu. Dengan demikian, intervensi kesehatan tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki kondisi saat ini, tetapi juga mengurangi risiko masalah gizi pada generasi berikutnya.

Secara nasional, pencegahan stunting telah menjadi agenda kesehatan pemerintah sejak satu dekade terakhir dan diperkuat setelah stunting ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia. Indonesia kemudian menjalankan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) 2018-2024 dengan pendekatan lintas sektor, yang menekankan intervensi gizi spesifik dan sensitif.

Secara global, perhatian terhadap stunting juga berkembang sejak persoalan kekurangan gizi anak ditempatkan sebagai bagian penting agenda pembangunan berkelanjutan. Target pembangunan global

melalui Sustainable Development Goals (SDGs) menempatkan penghapusan segala bentuk malnutrisi sebagai sasaran hingga 2030. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bersama UNICEF dan Bank Dunia juga sejak 1990-an mengembangkan pemantauan global terhadap indikator pertumbuhan anak, termasuk stunting.

Dalam membaca data stunting, Sijatiku mengingatkan agar angka dari sumber berbeda tidak dibandingkan secara langsung. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 memiliki sumber, metode, dan waktu pengukuran yang berbeda dengan data Sigizikesga/e-PPGBM serta data riil puskesmas.

“Angka stunting perlu dibaca berdasarkan sumber dan metode pengukurannya karena terdapat perbedaan sumber, metode, dan waktu pengukuran,” kata Sijatiku.

Melalui Gerakan Cegah Stunting melalui Aksi Bergizi, Pemprov Sultra menempatkan sekolah sebagai salah satu titik intervensi untuk membangun kebiasaan hidup sehat. Pemeriksaan kesehatan, pencegahan anemia, pemenuhan gizi, dan edukasi diharapkan menjadi rangkaian upaya berkelanjutan untuk menekan risiko stunting pada generasi mendatang. (*)

PERADI Profesional Dilantik, Gubernur Sultra ASR Soroti Integritas Advokat



Laporan: Lisna

SULTRA, BP-Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, mendorong organisasi advokat memperluas peran dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Tidak hanya menangani perkara, advokat dinilai perlu hadir melalui edukasi hukum dan pencegahan persoalan hukum sejak dini dengan tetap berpegang pada integritas, etika, profesionalisme, dan independensi.

Pesan tersebut disampaikan Andi Sumangerukka saat menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PERADI Profesional Kota Kendari, Kolaka, Andoolo, dan Baubau Masa Bakti 2026-2031 di Hotel Claro Kendari, Rabu malam (23/9/2026).

Menurut Gubernur, keberadaan advokat mempunyai posisi strategis karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak masyarakat dalam proses hukum. Pendampingan hukum yang dilakukan secara profesional, kata dia, menjadi bagian penting dalam memastikan proses peradilan berlangsung adil dan sesuai ketentuan.

“Profesi advokat merupakan profesi mulia. Karena itu, integritas, profesionalisme, etika, dan independensi harus menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas,” kata Andi Sumangerukka.

Ia menilai penegakan hukum tidak cukup hanya ditopang oleh perangkat aturan. Pelaksana profesi hukum juga

dituntut memiliki tanggung jawab moral agar hukum tidak berhenti sebagai norma tertulis, tetapi dapat memberikan kepastian, perlindungan, dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Secara historis, profesi advokat berkembang seiring kebutuhan masyarakat terhadap pembelaan hak di hadapan hukum. Di Indonesia, pengaturan profesi advokat memperoleh pijakan khusus melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-undang tersebut menempatkan advokat sebagai penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan aparat penegak hukum lainnya dalam menjalankan fungsi peradilan.

Secara internasional, prinsip mengenai hak memperoleh bantuan hukum juga berkembang dalam kerangka hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1948 memuat prinsip persamaan di hadapan hukum dan hak atas peradilan yang adil. Perkembangan tersebut kemudian memperkuat pentingnya akses masyarakat terhadap bantuan hukum yang independen.

Dalam konteks Sultra, Andi Sumangerukka berharap PERADI Profesional dapat mengambil peran lebih luas untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat. Advokat, menurut dia, tidak semestinya baru hadir ketika persoalan telah masuk ke ranah sengketa atau proses

peradilan.

“Advokat diharapkan hadir bukan hanya ketika masyarakat menghadapi persoalan hukum, tetapi juga memberikan edukasi dan membantu mencegah persoalan hukum sejak dini,” ujarnya.

Gubernur juga membuka ruang kolaborasi antara PERADI Profesional dan Pemerintah Provinsi Sultra. Kemitraan tersebut dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta ketahanan pangan berbasis agromaritim tetap berada dalam koridor hukum.

Kolaborasi itu, lanjut dia, sekaligus diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel. Dengan demikian, organisasi profesi advokat tidak hanya berfungsi sebagai wadah pengembangan profesi, tetapi turut mengambil bagian dalam membangun budaya hukum yang sehat di tengah masyarakat.

Andi Sumangerukka kemudian menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus DPD PERADI Profesional Kota Kendari, Kolaka, Andoolo, dan Baubau yang dilantik untuk masa bakti 2026-2031. Ia berharap jajaran pengurus mampu menjaga marwah profesi, memperkuat integritas, dan membangun kolaborasi untuk mendukung terwujudnya Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius. (*)

Buton Tengah Siapkan Lahan dan Draf NPHD untuk Percepat Program Lises



Laporan:Ardi

BUTON TENGAH, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, menuntaskan sejumlah persyaratan untuk mempercepat Program Listrik Perdesaan (Lises), terutama kepastian lahan, titik koordinat, perizinan, dan dokumen hibah. Langkah tersebut ditempuh agar pembangunan jaringan listrik yang menjadi bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) dapat segera masuk ke tahap verifikasi dan pelaksanaan.

Kecamatan Talaga Raya menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam percepatan tersebut. Pemerintah daerah menyatakan penetapan titik lokasi dan penyelesaian draf Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah dirampungkan melalui koordinasi pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa.

Kesiapan itu ditegaskan Bupati Buton Tengah Dr. Azhari saat menghadiri Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Lises serta Fasilitasi Penyiapan Lahan

dan Perizinan se-Sulawesi Tenggara di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Kendari, Kamis (1/10/2026). Pertemuan berlangsung pada 1-2 Oktober 2026 dan melibatkan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara.

“Akurasi data, kepastian lahan, koordinat lokasi, dan kesiapan perizinan menjadi faktor penting untuk mempercepat pembangunan jaringan listrik secara tepat sasaran,” kata Azhari.

Menurut dia, Pemkab Buton Tengah telah menyiapkan lahan sekaligus memfinalisasi draf NPHD bersama PT PLN (Persero). Kelengkapan tersebut dinilai penting agar proses pembangunan tidak tertahan persoalan administratif setelah titik lokasi ditetapkan.

Dalam forum sinkronisasi itu, pemerintah daerah juga diminta melengkapi setiap usulan dengan koordinat lokasi, status lahan, dan dokumen perizinan. PLN Pusat selanjutnya akan melakukan verifikasi lapangan melalui tim engineering untuk men-

cocokkan data usulan dengan kondisi faktual di lapangan.

“Kami terus memperkuat koordinasi dengan PLN agar tidak ada lagi wilayah yang belum mendapatkan akses listrik,” ujar Azhari.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Kementerian ESDM, PLN Pusat, Dinas ESDM Sultra, Koordinator DJK, serta kepala daerah se-Sulawesi Tenggara. Verifikasi lapangan juga diperlukan untuk mencegah tumpang tindih data lokasi sekaligus memastikan pembangunan jaringan sesuai kebutuhan masyarakat.

Upaya memperluas akses listrik memiliki konteks pembangunan yang panjang. Secara nasional, pemerintah membentuk Jawatan Listrik dan Gas pada 27 Oktober 1945 di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Saat itu kapasitas pembangkit yang dikelola mencapai 157,5 megawatt. Momentum tersebut kemudian menjadi dasar peringatan Hari Listrik Nasional.

Tantangan pemerataan listrik juga bu-

kan hanya persoalan Indonesia. Secara global, akses energi menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG 7 yang menargetkan akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua. Laporan Bank Dunia pada 2026 mencatat sekitar 655 juta orang di dunia masih belum memiliki akses listrik, menunjukkan bahwa elektrifikasi wilayah terpencil tetap menjadi agenda pembangunan internasional.

Bagi Buton Tengah, percepatan Lises karena itu tidak berhenti pada pembangunan jaringan. Pemerintah daerah perlu memastikan data lokasi akurat, lahan tersedia, dokumen lengkap, dan koordinasi dengan PLN berjalan hingga tahap verifikasi. Dengan kesiapan tersebut, program diharapkan mampu memperluas pemerataan akses listrik, khususnya bagi wilayah yang sebelumnya masih menghadapi persoalan elektrifikasi. (*)

Kepala Subbagian Tata Usaha Rina Adriana Pimpin Apel Kantor Pertanahan Busel Dorong Pelayanan Prima dan Ingatkan Disiplin Pegawai



Laporan:Firman

BUTON SELATAN, BP - Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan memperkuat komitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan tetap menjaga kedisiplinan seluruh pegawai. Penegasan itu disampaikan Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan, Rina Adriana Baiduri, S.ST., saat memimpin apel pagi di lingkungan kantor tersebut.

Dalam amanatnya, Rina menempatkan pelayanan masyarakat sebagai salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan tugas jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan. Setiap pegawai diminta menjalankan tugas secara profesional dan memberikan pelayanan secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pelayanan kepada masyarakat harus terus kita tingkatkan. Setiap pegawai memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik dan profesional,” ujar Rina

dalam amanatnya.

Selain kualitas pelayanan, Rina mengingatkan seluruh pegawai agar mempertahankan kedisiplinan dalam menjalankan tugas. Menurut dia, kedisiplinan menjadi fondasi penting agar setiap pekerjaan dapat dilaksanakan secara tertib, tepat, dan bertanggung jawab.

“Disiplin seluruh pegawai harus tetap dipertahankan. Kedisiplinan merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Penguatan pelayanan pertanahan tersebut sejalan dengan perkembangan administrasi pertanahan di Indonesia yang semakin menempatkan pelayanan publik, kepastian hukum, dan tertib administrasi sebagai bagian penting penyelenggaraan pemerintahan. Secara historis, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menjadi salah satu landasan utama penyelenggaraan urusan pertana-

han nasional.

Secara global, administrasi pertanahan juga berkembang dari sistem pencatatan konvensional menuju layanan yang semakin terdigitalisasi. Bank Dunia melalui berbagai agenda pembangunan pertanahan menempatkan kepastian hak atas tanah dan akses masyarakat terhadap layanan pertanahan sebagai faktor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi serta perlindungan hak masyarakat.

Melalui apel pagi tersebut, jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan diharapkan mampu mempertahankan disiplin kerja sekaligus terus meningkatkan kualitas pelayanan. Kombinasi keduanya menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan yang profesional, tertib, dan berorientasi pada kepentingan publik. (*)

Kemenkes-BPJS Uji KRIS, iDRG, dan RBKP di Makassar, 558 Faskes Terlibat



Peliput: Andina L

MAKASSAR, BP - Pemerintah mulai menguji penerapan Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP), Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), dan Indonesian Diagnosis Related Groups (iDRG) di Kota Makassar sebagai bagian dari persiapan perubahan tata kelola pelayanan kesehatan nasional. Uji coba tersebut berlangsung bersama tiga wilayah lain, yakni Kota Bandung, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Muara Enim.

Direktur Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya mengatakan, uji coba dilakukan maksimal selama satu tahun untuk memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan sekaligus memetakan persoalan yang mungkin muncul sebelum kebijakan diterapkan secara lebih luas. Secara keseluruhan, terdapat 464 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 94 rumah sakit yang mengikuti uji coba di empat daerah tersebut.

Di Makassar, pemantauan dilakukan Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan dengan mendatangi RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo, RS Tk. II Pelamonia, Puskesmas Tamalate, RSIA Sentosa, dan Klinik Kimia Farma Ahmad Yani. Pemeriksaan mencakup kesiapan pelayanan, sumber daya manusia, sarana-prasarana, hingga integrasi sistem antarlembaga.

Direktur Teknologi Informasi BPJS Kes-

ehatan Setiaji mengatakan hasil uji coba akan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan kebijakan. Menurut dia, penerapan nasional membutuhkan persiapan matang agar berbagai tantangan teknis dan pelayanan yang ditemukan di lapangan dapat diantisipasi sejak awal. “Kami siap mendukung penuh langkah uji coba ini. Tentu dibutuhkan persiapan yang matang sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan secara nasional,” katanya dalam kegiatan yang turut dihadiri Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Murti Utami, Kamis (1/10/2026).

Setiaji menambahkan, perubahan kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan menggeser orientasi pelayanan dari berbasis volume menuju berbasis nilai atau value. Pendekatan itu diharapkan tidak hanya menjaga keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetapi juga mendorong layanan yang lebih bermutu sehingga masyarakat memperoleh manfaat kesehatan yang lebih baik.

Dari sisi rumah sakit, Direktur Utama RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, dr. Annas Ahmad, menyatakan kesiapan institusinya mengikuti uji coba. Namun, ia menilai keberhasilan pelaksanaan membutuhkan koordinasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Ia juga meminta formula tarif iDRG memperhitungkan

inflasi, perkembangan teknologi, kebutuhan obat, serta biaya pengembangan rumah sakit.

“Tarif iDRG harus mampu mencerminkan kompleksitas penyakit dan biaya riil layanan. Kami juga berharap ada panduan untuk rumah sakit dan BPJS Kesehatan dalam memproses klaim,” ujar Annas.

Penerapan iDRG sendiri berkaitan dengan upaya pemerintah membangun sistem pembayaran pelayanan rumah sakit yang lebih terukur berdasarkan kelompok diagnosis dan karakteristik layanan. Sementara KRIS diarahkan untuk menyeragamkan standar minimum ruang rawat inap peserta JKN, sedangkan RBKP menata mekanisme rujukan berdasarkan kemampuan pelayanan fasilitas kesehatan, bukan semata-mata berdasarkan jenjang fasilitas.

Reformasi tersebut berlangsung dalam konteks perjalanan panjang JKN. Program JKN mulai beroperasi pada 1 Januari 2014 setelah pembentukan BPJS Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Sebelumnya, Indonesia memiliki sejumlah skema jaminan kesehatan yang berjalan terpisah. Konsolidasi melalui JKN kemudian menjadi salah satu perubahan terbesar dalam sistem pembiayaan kesehatan nasional.

Secara historis, model pembayaran berbasis kelompok diagnosis juga bukan

konsep baru dalam sistem kesehatan dunia. Diagnosis Related Groups (DRG) dikembangkan di Amerika Serikat pada akhir dekade 1960-an dan mulai digunakan dalam sistem pembayaran Medicare pada 1983. Model tersebut kemudian menyebar ke berbagai negara dengan penyesuaian terhadap sistem kesehatan masing-masing. Indonesia mengembangkan pendekatan iDRG untuk menyesuakannya dengan karakteristik pelayanan kesehatan nasional.

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene, yang melakukan kunjungan kerja bersamaan dengan pemantauan uji coba, mengapresiasi langkah pemerintah. Ia meminta evaluasi juga mempertimbangkan pengalaman pasien sebagai penerima layanan. “Setiap penduduk berhak mendapatkan layanan kesehatan yang mudah diakses. Kami harap fasilitas kesehatan dapat memberikan layanan sebaik-baiknya kepada seluruh pasien,” katanya.

Bagi pemerintah, uji coba di empat daerah tersebut menjadi tahap penting sebelum penerapan kebijakan secara nasional. Evaluasi terhadap kapasitas fasilitas kesehatan, tenaga medis, infrastruktur, sistem rujukan, mekanisme klaim, dan pengalaman pasien akan menentukan penyempurnaan akhir agar perubahan tata kelola JKN tidak hanya menghasilkan efisiensi pembiayaan, tetapi juga mempertahankan akses dan mutu layanan bagi peserta.(*)

Menkes Budi: Integritas dan Eksekusi Jadi Modal Pemimpin Kesehatan

Peliput: Lisna

JAKARTA, BP- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta calon pemimpin sektor kesehatan di Asia Tenggara tidak berhenti pada kemampuan merumuskan target, tetapi mampu menerjemahkannya menjadi tindakan. Integritas, komunikasi yang sederhana, kemampuan membangun narasi, dan ketegasan dalam eksekusi dinilai menjadi fondasi kepemimpinan untuk menghadapi perubahan sistem kesehatan.

Pesan tersebut disampaikan Budi ketika membuka Health Leadership Course yang diselenggarakan Asian Development Bank (ADB) di Jakarta, Senin (28/9/2026). Pelatihan itu diikuti lebih dari 60 peserta dari tujuh negara Asia Tenggara dan berlangsung selama lima hari untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan sekaligus mendukung reformasi sistem kesehatan di kawasan.

Budi menempatkan integritas sebagai syarat pertama bagi seorang pemimpin karena keputusan di sektor kesehatan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan negara. “Atasan terbaik yang pernah saya temui adalah seseorang yang memiliki integritas. Untuk memastikan bahwa dia tidak akan membohongi Anda atau negara Anda, dia harus menjadi pribadi yang berintegritas,” ujarnya.

Menurut Budi, kepemimpinan juga harus mampu membuat tujuan besar menjadi mudah dipahami dan diterapkan organisasi. Karena itu, Kementerian Kesehatan menjalankan transformasi melalui enam pilar, yakni reformasi layanan primer, layanan sekunder atau rumah sakit, ketahanan sistem kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, serta teknologi kesehatan.

Keenam pilar tersebut diarahkan untuk meningkatkan angka harapan hidup dan angka harapan hidup sehat. Salah satu bentuk penerapannya ialah penguatan layanan primer melalui dukungan pembiayaan ADB untuk pengadaan 10.000 USG dan 10.000 X-ray. Budi menilai setiap sasaran harus disertai mekanisme kerja yang jelas sehingga kebijakan tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan.

Kemampuan menyampaikan tujuan melalui storytelling juga dianggap penting. Pemimpin, kata Budi, harus mampu menjelaskan alasan sebuah tujuan ditetapkan, cara mencapainya, serta tindakan yang harus dilakukan. Pada tahap berikutnya, kemampuan eksekusi menjadi penentu apakah target tersebut benar-benar menghasilkan perubahan. “Jika Anda hanya berbicara dan memiliki target tetapi tidak menunjukkan cara mengeksekusi

dan mencapainya, Anda akan kehilangan kredibilitas di depan anggota Anda,” katanya.

Penekanan terhadap kepemimpinan kesehatan tersebut tidak terlepas dari perubahan tantangan kesehatan global. Country Director Indonesia Resident Mission ADB Bobur Alimov mengatakan Asia Tenggara menghadapi persoalan berupa populasi yang semakin menua, peningkatan penyakit tidak menular, serta dampak perubahan iklim. Tantangan tersebut, menurut dia, tidak dapat diselesaikan hanya oleh sektor kesehatan atau satu negara.

Dalam konteks itu, kerja sama lintas sektor dan lintas negara menjadi kebutuhan. “Tidak ada satu pun dari tantangan ini yang dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja, maupun oleh satu negara saja. Ini membutuhkan para pemimpin untuk bekerja lintas sektor dan lintas negara, membangun kemitraan, serta mengarahkan perubahan,” ujar Bobur.

Penguatan kepemimpinan kesehatan memiliki latar sejarah panjang dalam pembangunan kesehatan dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berdiri pada 1948 ketika komunitas internasional membangun sistem kesehatan global pasca-Perang Dunia II. Seiring berkembangnya ancaman penyakit menular, penyakit tidak menular, pandemi, dan perubahan iklim, pendekatan kesehatan internasional kemudian semakin menekankan kerja sama, penguatan sistem, serta kepemimpinan lintas negara.

Indonesia sendiri memasuki fase penting transformasi kesehatan setelah pembentukan sistem Jaminan Kesehatan Nasional pada 2014 dan terus memperluas digitalisasi layanan melalui SATUSEHAT. ADB menilai pengalaman Indonesia dalam penguatan layanan primer, kesehatan digital, dan JKN dapat menjadi pembelajaran bagi negara lain di kawasan. “Pengalaman Indonesia memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita semua,” kata Bobur.

Director Human and Social Development Sector Office ADB Eduardo Banzon menegaskan negara berkembang harus tetap memegang kendali atas agenda reformasi kesehatan masing-masing. ADB, menurut dia, memberikan dukungan pembiayaan dan teknis, bukan mendikte kebijakan negara. Pelatihan tersebut selanjutnya membahas tata kelola, pembiayaan kesehatan, perubahan iklim dan One Health, pencegahan serta kesiapsiagaan pandemi, kesehatan digital, inovasi, kolaborasi regional, dan kemitraan dengan sektor swasta. Peserta juga dijadwalkan mengunjungi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional serta sejumlah fasilitas kesehatan primer di Jakarta.(*)

PT FAREN GRAFIKA KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi	Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasetyo Korlip: Firman Redaktur: Kasrun,Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman Layouter: Rinin Pracetak: Aditya Cetak Jamaludin Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: La Harman Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks	Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
---	--	---

MK Tolak Diskualifikasi Gibran, Sengketa Syarat Pendidikan Dinilai Bukan Ranahnya



Mahkamah Konstitusi tidak mendiskualifikasi Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden meski menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA atau sederajat.

Laporan: Amran
JAKARTA, BP- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan yang meminta pembatalan atau diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI terkait persoalan syarat pendidikan dalam pencalonannya pada Pemilu Presiden 2024. MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena Gibran kini telah berstatus sebagai wakil presiden, bukan lagi calon wakil presiden.

Putusan itu dibacakan dalam sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XX-IV/2026 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Selasa (6/10) malam. Ketua MK Suharto menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan, substansi perkara yang diajukan tidak lagi tepat ditempatkan dalam rezim penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Status Gibran sebagai calon wakil presiden, menurut MK, telah berakhir setelah pasangan calon terpilih dilantik dan Gibran mengucapkan sumpah sebagai wakil presiden.

“Oleh karena itu, sekalipun dalam persidangan tidak ditemukan atau didapatkan bukti yang meyakinkan Mahkamah yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, ... secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan

Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden,” kata Adies.

Meski demikian, putusan MK mencatat fakta penting mengenai dokumen pendidikan yang dipersoalkan para pemohon. Dalam persidangan, tidak ditemukan bukti yang meyakinkan MK mengenai keberadaan ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dijadikan dasar penyetaraan pendidikan Gibran dengan jenjang minimal sekolah menengah sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf I Undang-Undang Pemilu.

MK kemudian menegaskan bahwa persoalan keabsahan dokumen dan terpenuhi atau tidaknya persyaratan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan lembaga lain yang ditentukan dalam konstitusi. Dengan demikian, temuan dalam persidangan tersebut tidak serta-merta menjadi dasar bagi MK untuk mencabut kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.

“Perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, ... secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan

dan keterpenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945,” tutur Adies.

Gugatan tersebut diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma MS Sihombing. Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Denny dalam persidangan sebelumnya menyebut dokumen yang diserahkan sebagai bagian dari persyaratan pencalonan Gibran kepada KPU bukan ijazah atau bukti kelulusan, melainkan surat keterangan penyetaraan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan. Dokumen tersebut menerangkan Gibran pernah menempuh studi di UTS Insearch, Sydney, Australia.

Menurut Denny, surat itu menyatakan pendidikan Gibran setara Grade 12 atau kelas 12 SMA dan setara dengan SMK peminatan Akuntansi. Namun, ia mempersoalkan tidak adanya keterangan dalam surat tersebut yang menyatakan Gibran telah lulus dari lembaga pendidikan tersebut.

Persoalan persyaratan pendidikan dalam pencalonan presiden dan wakil presiden memiliki sejarah panjang dalam sistem pemilu Indonesia. Ketentuan pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden berkembang

dari aturan konstitusional dan undang-undang pemilu yang terus mengalami perubahan sejak era reformasi. Pemilu presiden secara langsung sendiri baru pertama kali dilaksanakan pada 2004, setelah perubahan UUD 1945 mengubah mekanisme pemilihan presiden dari pemilihan oleh MPR menjadi pemilihan langsung oleh rakyat.

Dalam praktik demokrasi internasional, persoalan kelayakan administratif kandidat juga kerap menjadi objek sengketa setelah proses pemilu berlangsung. Sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, memiliki mekanisme berbeda untuk memeriksa kelayakan kandidat, mulai dari tahap pendaftaran, proses keberatan administratif, hingga mekanisme pengadilan. Perbedaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa kewenangan pengadilan pemilu sangat bergantung pada batas yurisdiksi yang diberikan konstitusi dan undang-undang masing-masing negara.

Putusan MK dalam perkara ini pada akhirnya tidak menyatakan Gibran terbukti memenuhi atau tidak memenuhi syarat pendidikan secara substantif untuk kemudian dijatuhi sanksi berupa diskualifikasi. MK lebih menitikberatkan pada persoalan kewenangan dan status hukum Gibran setelah pelantikan. Dengan amar “permohonan para pemohon tidak dapat diterima”, MK menutup perkara tersebut dalam rezim PHPU Presiden dan Wakil Presiden. (*)

KPK Periksa Nusron Wahid, Dalam Dugaan Korupsi di Lingkungan ATR/BPN



KPK Periksa Nusron Wahid, Dalam Dugaan Korupsi di Lingkungan ATR/BPN

Laporan: Hadi

JAKARTA, BP- Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memasuki tahap pemeriksaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Nusron dijadwalkan diperiksa sebagai saksi pada Rabu (7/10/2026) untuk membantu penyidik memperjelas konstruksi perkara.

Pemanggilan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan suap, gratifikasi, dan penerimaan lainnya yang antara lain menyangkut pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami informasi yang berkaitan dengan perkara tersebut.

“Benar, hari ini, Rabu (7/10), penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap NW selaku Menteri ATR/BPN,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

KPK sebelumnya menyatakan meyakini Nusron akan memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai bentuk kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum. Namun, hingga Rabu siang, KPK masih menunggu kedatangan Nusron untuk menjalani pemeriksaan.

“Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara ini,” ujar Budi. Ia menegaskan proses penyidikan dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak ber-

salah serta hak hukum setiap pihak.

Perkara ini telah menempatkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka ialah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugianto, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.

KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Jabodetabek pada Senin (14/9). Dalam operasi tersebut, 19 orang diamankan dan penyidik menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp106,3 miliar. Para tersangka kemudian menjalani penahanan untuk 20 hari pertama, sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026, di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Dalam konstruksi perkara, Adrianto Pitojo Adhi bersama Rizal Pahlevi selaku pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b KUHP juncto Pasal VII angka 48 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 606 ayat (1) KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 KUHP.

Sementara itu, Sontang bersama Erwin serta Lampri bersama Arif Sugi-

yanto, Fahd A Rafiq, dan Muhammad Fakhry disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau ketentuan Pasal 606 ayat (2) KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 KUHP.

Secara historis, penguatan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak terlepas dari agenda reformasi setelah 1998. Gagasan pembentukan lembaga antikorupsi antara lain berangkat dari TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan kemudian diperkuat melalui UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Dalam konteks global, Indonesia juga telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada 2006. Konvensi PBB tersebut menjadi salah satu kerangka internasional dalam memperkuat pencegahan, penindakan, kerja sama, dan pemulihan aset terkait korupsi.

Pemeriksaan Nusron menjadi bagian dari rangkaian penyidikan KPK untuk mengurai hubungan antara informasi yang dimiliki penyidik dengan konstruksi perkara yang telah menetapkan delapan tersangka. Status Nusron dalam pemeriksaan tersebut adalah saksi, sehingga pemanggilan dan pemeriksaan-nya tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan sebagai tersangka. (*)

Buton Selatan, Baubau, dan Buton Bangun Sinergi Pangan untuk Jaga Daya Beli Warga dan Kendalikan Inflasi

Yusran mengatakan stabilitas pangan tidak dapat ditangani sendiri-sendiri karena rantai pasok komoditas bergerak melampaui batas administratif. “Kerja sama ini bukan sekadar kesepakatan tertulis, tetapi langkah nyata untuk menjaga kesejahteraan masyarakat,” kata Yusran.

Melalui kesepakatan itu, pemerintah daerah akan melakukan pemantauan harga secara bersama, bertukar data stok dan perkembangan harga, serta memperluas distribusi komoditas yang berpotensi menyumbang inflasi. Pemerintah juga akan memperkuat komunikasi kepada masyarakat mengenai kondisi pasokan dan harga pangan agar informasi yang beredar lebih terbuka.

Fokus kerja sama terutama diarahkan pada komoditas hortikultura berdasarkan pemetaan kelebihan dan kekurangan pasokan di Baubau, Buton, dan Bu-

ton Selatan. Pelaksanaannya akan melibatkan sumber daya masing-masing daerah dan dapat diperkuat dengan peran badan usaha milik daerah, koperasi, serta pelaku usaha melalui Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara teknis.

Kesepakatan tersebut berlaku selama dua tahun sejak penandatanganan dan dievaluasi setiap tahun. Pembiayaannya bersumber dari anggaran masing-masing pemerintah daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Apabila muncul perbedaan pandangan dalam pelaksanaan, ketiga daerah sepakat menyelesaikannya melalui musyawarah.

Kerja sama pengendalian harga pangan merupakan bagian dari tantangan yang lebih luas dalam menjaga stabilitas ekonomi. Di Indonesia, pen-

endalian inflasi pangan menjadi perhatian penting sejak periode gejolak harga komoditas dan krisis ekonomi 1997-1998. Secara global, lonjakan harga pangan kembali menjadi persoalan besar setelah pandemi Covid-19 dan gangguan rantai pasok dunia, yang kemudian diperburuk oleh konflik geopolitik serta kenaikan harga energi dan pangan internasional.

Karena itu, kerja sama Baubau, Buton, dan Buton Selatan menempatkan kelancaran pasokan sebagai salah satu instrumen untuk meredam tekanan harga dari sisi distribusi. Ketiga daerah berharap koordinasi data, pemetaan surplus-defisit, dan keterlibatan pelaku usaha dapat membuat pergerakan pangan lebih efisien sekaligus menjaga daya beli masyarakat. (*)

Kepsek SDN 2 Baadia-Baubau Nursida Kembangkan Gerakan TANGGUH, Adaptasi 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat

Awal.

“Ketujuh huruf dalam akronim TANGGUH sengaja dirancang berpadanan langsung, satu lawan satu, dengan ketujuh kebiasaan dalam 7KAIH sehingga mudah diingat, mudah diajarkan, dan mudah diukur keberhasilannya,” kata Nursida.

Konsep tersebut menjadi respons atas kebutuhan sekolah untuk menerjemahkan kebijakan pendidikan nasional ke dalam praktik sehari-hari. Nursida menilai pendekatan yang hanya bersifat instruktif dan seremonial tidak cukup untuk membentuk kebiasaan yang melekat pada peserta didik.

“Transformasi pendidikan tidak lahir dari kebijakan semata, tetapi dari kepemimpinan pembelajaran yang berani mengu-

bah cara sekolah bekerja sehari-hari,” ujarnya.

Gerakan TANGGUH mengadaptasi 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH) yang mencakup bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur cepat. Program tersebut diluncurkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai bagian dari Asta Cita keempat pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.

Secara historis, perhatian terhadap pembentukan karakter melalui kebiasaan di sekolah bukan hal baru. Di Indonesia, pendidikan karakter memperoleh penguatan dalam kebijakan nasional, termasuk melalui Gerakan

Nasional Revolusi Mental yang dicanangkan pemerintah pada 2014. Secara global, UNESCO juga sejak lama menempatkan pendidikan sebagai instrumen pembentukan manusia yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi memiliki nilai, keterampilan sosial, dan tanggung jawab terhadap masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, Nursida menempatkan kepala sekolah tidak sekadar sebagai pengelola administrasi, tetapi sebagai penggerak perubahan pembelajaran. Gerakan TANGGUH di SDN 2 Baadia diharapkan menjadi praktik baik yang dapat direplikasi sekolah lain untuk membangun kebiasaan positif peserta didik secara konsisten. (*)

HUT ke-81 TNI, Dandim 1413/Buton Tekankan Lima Pilar Budaya Kerja PRIMA

hadapi ketidakpastian global, perkembangan ruang informasi dan kognitif, serta berbagai bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara.

“Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang dipikul. Penguatan ini harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme,” ujar Dandim saat membacakan amanat Panglima TNI.

Dalam amanat itu dijelaskan, sikap Profesional diwujudkan melalui penguasaan tugas pokok, latihan yang sungguh-sungguh, kepatuhan terhadap hukum, dan integritas. Responsif berarti mampu membaca situasi wilayah, mende- teksi ancaman sejak dini, serta bertindak cepat dan terukur ketika masyarakat membutuhkan kehadiran TNI.

Adapun prinsip Integratif diarahkan pada penguatan kolaborasi dan sinergi dengan seluruh komponen bangsa untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pembangunan nasional. Pilar Modern menuntut prajurit mampu mengoperasikan teknologi dan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alp- hankam) mutakhir, sedangkan Adaptif menekankan keterbukaan terhadap pembelajaran, inovasi, serta penyesuaian doktrin dan strategi menghadapi perubahan zaman.

Pesan tersebut juga berkaitan dengan perkembangan sejarah TNI yang lahir dari dinamika perjuangan memper-

tahankan kemerdekaan Indonesia. Secara historis, TNI berawal dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada 22 Agustus 1945, kemudian berkembang menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara Republik Indone- sia (TRI), hingga akhirnya menja- di TNI pada 3 Juni 1947. Dalam perkembangannya, TNI tidak hanya menghadapi tantangan per- tahanan konvensional, tetapi juga harus menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan karakter ancaman keamanan.

Dalam konteks internasional, perubahan lingkungan strategis setelah berakhirnya Perang Dingin pada 1991 turut mengubah pola ancaman keamanan global. Konf- lik bersenjata, perang informasi, perkembangan teknologi militer, keamanan siber, dan disinforma- si menjadi bagian dari tantangan pertahanan modern. Karena itu, pesan tentang profesionalisme, modernisasi, dan kemampuan adaptasi menjadi bagian penting dari kesiapan institusi pertahanan menghadapi perubahan tersebut.

Upacara HUT ke-81 TNI di wilayah Kodim 1413/Buton turut dihadiri Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E., Wakil Wali Kota Baubau Ir. Wa Ode Ham- sinah Bolu, M.Sc., Forkopimda Kota Baubau dan Kabupaten Bu- ton, Wakil Bupati Buton, Wakil Bupati Buton Tengah, Ketua TP PKK Kota Baubau, serta tamu un- dangan lainnya. Peringatan terse- but sekaligus menjadi momentum memperkuat hubungan TNI den- gan pemerintah daerah dan ma- syarakat dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan di daerah. (*)

Kantor Pertanahan Buton Selatan Ikuti Rapat Validasi Blanko Sertipikat Analog, ATR/BPN Sultra Perkuat Tertib Adninistras



Kantor Pertanahan untuk men- yamakan langkah dalam pen- catatan dan pengelolaan perse- diaan blanko sertipikat analog.

Secara historis, sertipikat tanah di Indonesia selama pu- luh tahun dikelola dalam bentuk dokumen fisik sebelum transformasi layanan pertanah- an berbasis elektronik berkem- bang. Perubahan itu sejalan dengan kebutuhan pemerintah meningkatkan ketertiban arsip, keamanan dokumen, serta ak- urasi data pertanahan. Secara global, digitalisasi administrasi pertanahan juga berkembang di berbagai negara sebagai bagian dari modernisasi layanan pub- lik dan penguatan sistem pen- catatan hak atas tanah.

Dalam konteks tersebut,

validasi opname fisik blanko sertipikat analog tetap memiliki arti penting kare- na berkaitan dengan pengendalian doku- men pertanahan yang masih berada da- lam tata kelola administrasi. Data yang sesuai antara pencatatan dan kondisi fisik menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan administrasi yang tertib dan dapat ditelusuri.

Keikutsertaan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan dalam rapat tersebut menunjukkan koordinasi antara jajaran Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Tenggara dalam memperkuat tata kelola adminis- trasi. Melalui kegiatan yang berlangsung secara daring itu, setiap Kantor Pertana- han diharapkan mampu memastikan data persediaan blanko sertipikat analog tersaji secara akurat dan dapat diper- tanggungjawabkan. (*)

Bupati Buton Tengah Dr Azhari Perkuat Sinergi Lintas Sektor Tangani RTLH dan Kawasan Kumuh

perkuat kepastian hukum atas tanah. Langkah tersebut dinilai penting agar intervensi pemer- intah dalam pengentasan kemis- kinan dan peningkatan kualitas hunian tepat sasaran.

Bupati Buton Tengah Dr. Azhari mengatakan akurasi data dan legalitas tanah merupakan dua unsur penting yang harus berjalan beriringan dalam pe- nataan permukiman. Karena itu, ia meminta Pj. Sekretaris Daerah Armin dan Kepala Di- nas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengawal proses validasi data secara ketat. “Data yang presisi dan legalitas tanah menjadi fondasi agar intervensi pemerintah tepat sasaran,” kata Azhari dalam Rakor Pemutakh- iran Data RTLH, Pensertifika- sian Tanah, dan Penanganan Kawasan Kumuh di Aula Pan- cana, Lantai V Gedung Kantor Bupati Buton Tengah, Selasa (29/9/2026).

Rakor tersebut juga diarahkan untuk mengurai persoalan tapal batas yang berpotensi menghambat proses pensertifikasian tanah masyarakat. Azhari meminta kepala desa menyelesaikan perso- alan batas wilayah secara kondusif melalui musyawarah. “Kendala tapal batas harus diselesaikan dengan mengede- pankan musyawarah agar proses

pensertifikasian aset warga dapat berjalan lancar,” ujarnya.

Penguatan koordinasi melibat- kan seluruh tingkatan pemerin- tah. Hadir dalam pertemuan itu Wakil Bupati Buton Tengah Muh. Adam Basan, S.Sos., Pj. Sekda Armin, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Tengah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta seluruh camat, lurah, dan kepala desa se-Kabu- paten Buton Tengah.

Secara nasional, persoalan huni- an tidak layak dan kawasan kumuh telah lama menjadi bagian dari agenda pembangunan perkotaan dan pengentasan kemiskinan. Pe- merintah Indonesia memasukkan peningkatan kualitas permukiman sebagai salah satu agenda pemban- gunan, sejalan dengan Sustain- able Development Goals (SDGs) Tujuan 11 yang mendorong kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Secara global, agenda penyediaan hunian layak juga menguat sejak Habitat I di Vancouver pada 1976 dan kembali ditegaskan melalui New Urban Agenda pada Konfer- ensi Habitat III di Quito, Ekuador, pada 2016.

Dalam konteks Buton Tengah, pendekatan tersebut diterjemah- kan melalui pemutakhiran data RTLH, penataan kawasan kumuh, dan percepatan sertifikasi tanah.

Ketiganya saling berkaitan karena data menentukan sasaran program, sementara kepastian status tanah menja- di salah satu prasyarat penting dalam penataan dan peningkatan kualitas permukiman.

Azhari berharap sinergi pemerintah daerah, Kan- tor Pertanahan, kecamatan, kelurahan, dan desa tidak berhenti pada rapat koordi- nasi, tetapi dilanjutkan den- gan penyelesaian persoalan di lapangan. “Sinergi lintas sektor harus diperkuat agar persoalan kelayakan hunian dan kepastian hukum tanah dapat diselesaikan lebih cep- at,” katanya.

Dengan basis data yang lebih akurat dan koordinasi yang terintegrasi, Pemkab Buton Tengah menargetkan penanganan RTLH dan ka- wasan kumuh dapat dilaku- kan secara lebih terukur dan tepat sasaran. Upaya itu sekaligus diarahkan un- tuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman serta menghadirkan hunian yang layak dan bermartabat bagi masyarakat. (*)

Sambut HUT Kota, Satpol PP Baubau Ajak Pedagang Tertibkan Lapak Kotamara



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP-Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Baubau pada 17 Oktober 2026, Pemerintah Kota Baubau mendorong penataan ruang publik melalui pendekatan persuasif. Di kawasan Kotamara, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama pedagang bergotong royong membersihkan lingkungan dan menata kembali lapak jualan, Minggu (4/10/2026) sore.

Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 16.00 Wita itu dipimpin Plt. Kepala Satpol PP Kota Baubau Dr. Moh. Tasdik, S.H., M.Si. Puluhan pemilik gerobak ikut terlibat, bersama Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Baubau,

Camat Batupoaro, serta Lurah Nganganaumala.

Penataan dilakukan dengan menggeser dan merapikan posisi gerobak serta membersihkan sampah di sekitar area berjualan. Pengaturan tersebut diarahkan agar kegiatan ekonomi tetap berjalan, tetapi tidak menghambat mobilitas pengunjung maupun mengurangi kenyamanan pedestrian di kawasan Kotamara.

“Petugas dan para pedagang bahu-membahu membersihkan sampah serta menata posisi gerobak agar lebih rapi dan teratur,” ujar Moh. Tasdik dalam siaran pers, Minggu (4/10/2026).

Menurut Tasdik, penataan kawasan tidak semata-mata berkaitan dengan ketertiban, tetapi juga up-

aya membangun ruang publik yang nyaman bagi masyarakat. Keterlibatan pedagang menjadi penting karena keberlanjutan kebersihan dan kerapian kawasan tidak dapat hanya bergantung pada petugas pemerintah.

“Para pedagang kami imbau terus menjaga kebersihan dan ketertiban lapaknya secara mandiri,” katanya. Dengan pola tersebut, Kotamara diharapkan tetap menjadi ruang publik sekaligus sentra ekonomi lokal yang dapat digunakan masyarakat secara nyaman.

Penataan ruang publik menjelang perayaan hari jadi kota memiliki konteks yang lebih luas. Secara historis, perkembangan kota-kota di Indonesia tidak terlepas dari keberadaan ruang

publik dan kawasan perdagangan sebagai tempat interaksi sosial serta penggerak ekonomi masyarakat. Secara internasional, konsep public space juga berkembang sebagai bagian penting tata kota modern, yang menempatkan akses, kebersihan, kenyamanan, dan keteraturan sebagai unsur pendukung aktivitas warga.

Bagi Pemkot Baubau, pembenahan Kotamara menjadi bagian dari upaya menghadirkan wajah kota yang bersih, tertib, dan nyaman menjelang puncak perayaan HUT Kota Baubau. Penataan tersebut sekaligus diharapkan meningkatkan daya tarik kawasan, tanpa mengesampingkan keberadaan pedagang sebagai bagian dari aktivitas ekonomi lokal. (*)

HUT Baubau, Job Fair 2026 Hadirkan Peluang Kerja dan Layanan Cek Bansos di Kotamara

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau membuka ruang baru bagi masyarakat untuk mengakses kesempatan kerja sekaligus memperoleh layanan sosial melalui Job Fair Kota Baubau 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Baubau itu akan dipusatkan di Lapangan Takraw Kotamara pada 12-15 Oktober 2026.

Bursa kerja tersebut diselenggarakan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Baubau dengan mengusung tema “Temukan Peluangmu, Raih Masa Depanmu!”. Selama empat hari pelaksanaan, masyarakat dapat mengunjungi lokasi kegiatan mulai pukul 09.00 hingga 16.00 WITA.

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Baubau, Dra. Hj. Sitti Amalia Abibu, M.Si., mengatakan Job Fair dirancang sebagai sarana mempertemu-

kan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Pertemuan langsung itu diharapkan memperpendek akses masyarakat terhadap informasi dan proses rekrutmen.

“Melalui kegiatan ini, Pemkot Baubau berharap dapat memperluas penyerapan tenaga kerja lokal demi mendorong terwujudnya Kota Baubau yang lebih maju, sejahtera, dan berbudaya,” kata Sitti Amalia dalam siaran pers, Senin (5/10/2026).

Selain bursa lowongan kerja, pemerintah kota menyiapkan stan pelayanan publik untuk pengecekan bantuan sosial. Layanan tersebut memanfaatkan Aplikasi Perlindungan Sosial yang terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Kehadiran layanan sosial dalam satu lokasi membuat kegiatan tidak hanya ditujukan bagi warga yang sedang mencari pekerjaan. Masyarakat juga

dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk memperoleh informasi mengenai status bantuan sosial melalui layanan yang disediakan pemerintah.

Sitti Amalia mengimbau pencari kerja datang dengan persiapan administrasi yang memadai. Dokumen lamaran, termasuk persyaratan yang dibutuhkan perusahaan, perlu disiapkan agar kesempatan mengikuti proses rekrutmen dapat dimanfaatkan secara maksimal.

“Para pencari kerja kami imbau mempersiapkan dokumen lamaran terbaik dan memanfaatkan momentum ini untuk memperluas akses karier,” ujarnya.

Secara historis, bursa kerja merupakan salah satu instrumen yang berkembang seiring perubahan pasar tenaga kerja. Di Indonesia, pemerintah dan dunia usaha sejak lama menggunakan pameran kerja sebagai sarana

mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja secara langsung, terutama ketika informasi lowongan belum mudah diakses melalui platform digital.

Perkembangan tersebut kemudian memasuki fase baru pada era digital. Jika sebelumnya pencari kerja banyak mengandalkan pengumuman dan pertemuan fisik, proses pencarian pekerjaan kini juga berlangsung melalui platform daring. Namun, pertemuan langsung dalam bentuk Job Fair tetap memiliki fungsi penting karena memungkinkan pencari kerja memperoleh informasi, berkomunikasi dengan perekrut, dan mengikuti proses seleksi dalam satu rangkaian kegiatan.

Fenomena serupa berkembang secara global. Pameran karier dan rekrutmen terbuka di berbagai negara menjadi bagian dari strategi mempertemukan kebutuhan tenaga kerja perusahaan dengan keterampilan

Disiplin ASN Diperketat, Sekda Baubau Terapkan Kebijakan Zero Toleransi



Laporan: Andina

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau mempertegas penegakan disiplin aparat sipil negara (ASN) dengan menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap pelanggaran. Pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) diminta tidak membiarkan ASN mangkir atau mengabaikan kewajiban kedinasan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau La Ode Darus Salam saat memimpin apel pagi ASN di pelataran Kantor Wali Kota Baubau, Palagimata, Senin (5/10/2026). Ia meminta pengawasan terhadap kedisiplinan aparat dilakukan secara lebih konsisten di masing-masing OPD.

“Zero toleransi artinya tidak ada toleransi terhadap pihak yang melakukan kesalahan, tidak disiplin, tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas,” kata La Ode Darus Salam dalam arahannya.

Menurut dia, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan secara administratif. Setiap pimpinan OPD bertanggung jawab memastikan bawahannya menjalankan kewajiban sebagai aparaturnegara. Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan dan melalui mekanisme pemberian sanksi secara berjenjang.

Penekanan terhadap disiplin ASN tersebut sejalan dengan kerangka kepegawaian nasional yang selama ini menempatkan kepatuhan aparat sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan. Pemerintah sebelumnya menerbitkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan kemudian memperbaruinya melalui PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang mengatur kewajiban, larangan, serta hukuman disiplin.

Dalam perkembangan administrasi pemerintahan modern,

prinsip disiplin aparat juga berkaitan dengan gagasan profesionalisme birokrasi. Model birokrasi modern yang berkembang sejak awal abad ke-20 menekankan aturan, pembagian kewenangan, serta kepatuhan terhadap prosedur sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip serupa kemudian berkembang di berbagai negara dalam upaya membangun pelayanan publik yang profesional dan akuntabel.

La Ode Darus Salam mengatakan kebijakan penegakan disiplin tersebut juga menjadi salah satu hal yang telah dibahas dalam koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, ia meminta pimpinan OPD memberikan perhatian serius terhadap kehadiran dan kepatuhan ASN terhadap aturan kedinasan.

Selain persoalan disiplin, Sekda mengingatkan seluruh OPD segera menindaklanjuti surat Wali Kota Baubau mengenai rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Baubau ke-485 dan 25 tahun sebagai daerah otonom. Salah satu yang ditekankan ialah kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan atribut pakaian selama rangkaian kegiatan berlangsung.

“Yang belum menyesuaikan sesuai dengan isi surat, segera menyesuaikan, terutama atribut pakaian yang kita kenakan. Hargai setiap surat yang disampaikan kepada kita semua,” ujarnya.

Persiapan kegiatan juga menjadi perhatian. Para ketua seksi dan panitia diminta kembali mengevaluasi kesiapan masing-masing, khususnya seksi karnaval budaya dan Bubus Siana Lipu. Evaluasi mencakup kebutuhan sarana, pemanfaatan lokasi, hingga kepastian waktu pelaksanaan agar setiap rangkaian kegiatan dapat dipersiapkan secara terukur.

Pada kesempatan yang sama, seluruh OPD diminta meningkatkan partisipasi dalam kegiatan pengecatan trotoar sebagai bagian dari persiapan menyambut Hari Jadi Kota Baubau. Kegiatan tersebut telah disampaikan melalui surat Dinas Lingkungan Hidup, tetapi hingga apel berlangsung baru sebagian OPD yang terlihat aktif melaksanakannya. Pemerintah kota karena itu meminta seluruh perangkat daerah segera menyesuaikan dan mengambil bagian sesuai pembagian tugas. (*)



pencari kerja. Perubahan teknologi memang menggeser cara perekrutan, tetapi kebutuhan terhadap mekanisme yang mempertemukan kedua pihak secara langsung tetap bertahan.

Dengan pelaksanaan Job Fair 12-15 Oktober 2026 tersebut, Pemkot Baubau berharap masyarakat

tidak sekadar memperoleh informasi lowongan, tetapi mampu mengubah peluang tersebut menjadi kesempatan kerja. Pemerintah juga mengajak masyarakat memanfaatkan stan cek bantuan sosial sehingga rangkaian kegiatan HUT Kota Baubau dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara bersamaan. (*)